

# Pengembangan UMKM melalui Program BPUM dalam Upaya Peningkatan Ekonomi

Vol 9 Issue 2  
(Agustus, 2025)

Atika Dwi Febriyanti<sup>1</sup>, Sandra Kirana Mirella Manjani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: atikadwifebriyanti@gmail.com<sup>1</sup>,  
sandrakiranamirellamanjani@gmail.com<sup>2</sup>,

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

BPUM, UMKM, Economic

### How to Cite:

APA Style 7<sup>th</sup>



## ABSTRACT

*This study aims to determine the development of the UMKM sector through the BPUM program as an increase economy in Tenggarong Seberang District. This research uses descriptive qualitative data through interviews, observations, photos using primary data sources and secondary data sources and uses descriptive analysis data analysis techniques. The results of this study indicate that out of 1776 UMK consisting of 11 business sectors, they feel quite helped by the existence of BPUM, business actors can develop their businesses with the assistance of capital from the government.*

## 1. Pembahasan

Perekonomian Masyarakat Indonesia mengalami banyak kemunduran di masa pandemic covid-19. Hal ini juga sangat dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan negara, dalam negara berkembang umkm menjadi alternatif agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data kementerian Koperasi terdapat sebanyak 163.713 pelaku Usaha Mikro di Indonesia terkena dampak adanya pandemi Covid-19. Sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pemerintah mencoba memberikan perhatian khusus kepada sektor Umkm mengingat karena Umkm telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional karena dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat menekan angka pengangguran pada suatu daerah.

Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, (2013), Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Umkm, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Umkm adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan lain. Usaha mikro merupakan usaha milik pribadi. Ditengah Pandemi banyak Usaha mikro mengalami Penurunan angka penjualan dan pendapatan yang sangat signifikan sehingga membuat banyak pelaku usaha mikro kalang kabut. Pemerintah mencemaskan hal ini karena apabila banyak Umkm yang gulung tikar, maka hal ini akan menjadi pemicu meningkatnya angka pengangguran bahkan angka kemiskinan juga akan meningkat. Jika angka kemiskinan meningkat maka kesejahteraan masyarakat dapat turun secara drastis. Maka dari itu, sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, berdasarkan pertimbangan yang cukup matang pemerintah memberikan program Bantuan Produktif Usaha Mikro kepada Umkm di

setiap daerah di Indonesia. Melalui program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Berdasarkan pada regulasi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pasal 20 ayat 1 tentang pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah memberikan bantuan tunai kepada Umkm yang mana dalam hal pencairan dana diberikan langsung kepada masyarakat, Pemerintah berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk dijadikan mitra penyaluran dana langsung kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan sektor Umkm melalui program Bpum sebagai peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Tenggarong Seberang. program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM ini difokuskan untuk Umkm yang berasal dari golongan usaha mandiri masyarakat dan rata-rata pedagang seperti (toko sembako, penjual makanan minuman, dll), Industri (kerupuk, kue, roti, dll), penyedia jasa (penjahit, laundry, bengkel las, penggilingan padi dll), petani, peternak, dan nelayan. pengembangan Umkm ini ditargetkan akan disalurkan kepada seluruh Umkm yang ada di Kec. Tenggarong Seberang dengan total hampir 2.000 UMKM dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan perekonomian di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur. Dalam Implementasinya Sebanyak puluhan ribu Umkm telah mendapatkan bantuan tambahan secara tunai, yang harapannya dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekaligus penambahan modal usaha bagi Umkm terdampak pandemi covid-19. Penelitian ini akan menguraikan lebih dalam tentang bagaimana pengembangan dan penyaluran bantuan program Bpum di Kecamatan Tenggarong Seberang sekaligus melihat apa saja kendala di lapangan yang berdasar pada pendapat dari masyarakat dan pemerintah setempat. serta bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat setelah program Bpum resmi terealisasi di Kecamatan Tenggarong Seberang.

## 2. Metode

Dalam melakukan kegiatan ini, peneliti menggunakan jenis data penelitian secara kualitatif deskriptif. Menurut (Moellog, Lexy J. 2002:112) penelitian kualitatif merupakan sebagian bentuk prosedur dari penelitian yang menghasilkan adanya data secara deskriptif berupa kata-kata secara tertulis, lisan maupun dalam bentuk tindakan. Penggunaan Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk bisa memperoleh jawaban dalam bentuk tanggapan atau persepsi narasumber, sehingga dalam pembahasan ini bersifat secara kualitatif atau menggunakan penjelasan dengan kata-kata, skema, kalimat serta pernyataan.

Untuk model sumber data, peneliti lebih memilih menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan cara pengumpulan data melalui tahap wawancara dengan pihak-pihak terkait maupun informan, bersumber dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, internet, berita dari media online, dll. Dan berdasarkan sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, observasi, foto, dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber Data Primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah, KASI PMD Kecamatan Tenggarong Seberang H.Zukran.S.SOS, dan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

Dalam penelitian ini kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak Kecamatan Tenggarong Seberang, dan dengan menggunakan pendekatan data faktual dari instansi terkait sehingga bisa dengan penuh memahami realitas penerapannya di lapangan untuk dijadikan sumber objek utama dalam penelitian yang kami teliti. Sedangkan untuk Model teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Melalui analisis deskriptif, peneliti dapat mendeskripsikan informasi yang telah didapat dengan variabel

yang diteliti, yang mana dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam membantu pengembangan Sektor UMKM Melalui Program BPUM untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat terutama pada daerah Kecamatan Tenggarong Seberang.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Model pengembangan**

UMKM di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang sangat beraneka ragam mulai dari produksi makanan ringan sampai makanan tradisional, berternak, bertani dan pemberdayaan perikanan, selain itu terdapat pula UMKM di bidang Jasa seperti Penjahit dan Bengkel. Dalam hal pengembangan usaha mikro terkait dengan pemasaran produk, Umkm di Kecamatan Tenggarong Seberang memanfaatkan pemasaran secara offline dan sebagian memasarkan produk-produk usahanya secara online. Namun setelah diterapkannya *social distancing* yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas berkerumun di keramaian banyak diantara para pelaku usaha mikro mengalami begitu banyak penyusutan pendapatan karena kondisi pasar yang sedang tidak stabil. hal ini mengakibatkan banyak UMKM yang kesulitan melanjutkan usahanya karena perputaran modal usaha menjadi tidak stabil. Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah mengeluarkan Peraturan tentang penyaluran bantuan dari pemerintah untuk para pelaku usaha mikro dengan maksud mempercepat pemulihan perekonomian nasional di tengah pandemic yang telah tercantum di Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020. kebijakan ini merupakan bentuk Kepekaan Pemerintah terhadap Umkm di masa pandemic yang mengalami begitu banyak penurunan pendapatan.

Dalam upaya pengembangan Umkm melalui program Bpum ini pemerintah membantu para pelaku usaha mikro dalam hal pendanaan modal usaha yang mana para pelaku usaha mikro yang sudah diusulkan oleh kecamatan akan ditransfer dana langsung ke rekening pribadinya. Adanya Bpum cukup membantu sektor Umkm yang sudah mulai layu kini berangsur-angsur bangkit kembali karena mendapatkan penambahan modal usaha dari pemerintah. Sayangnya model pengembangan Umkm melalui Bpum di Tenggarong Seberang hanya berfokus pada penambahan dana untuk modal usaha saja, sebelumnya pemerintah pernah melakukan pengembangan terhadap umkm seperti program pelatihan keterampilan, pelatihan pengelolaan modal, pengembangan kreativitas dll yang disertai pemantauan secara intensif (Suci, 2016). apabila dalam implementasi Bpum disertai dengan pelatihan keterampilan untuk para pelaku usaha mikro seperti program Bpum ini akan menjadi lebih efektif untuk meningkatkan perekonomian karena di masa pandemi banyak usaha-usaha yang macet total karena situasi dan kondisi yang memang sedang tidak mendukung, banyak sekali pelaku usaha mikro yang kebingungan mengenai usaha apa yang cocok untuk dijalankan di masa pandemi

#### **Peranan pemerintah**

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat peranan pemerintah sangatlah dibutuhkan di dalamnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indikator penting sebagai nilai tolak ukur kesejahteraan masyarakat itu menyanggung pada hal mengenai pendapatan, pengeluaran rumah tangga, besar kecilnya angka konsumsi, keadaan tempat tinggal, fasilitas, maupun nilai ekonomi yang mencukupi (Samud, 2018). Membahas polemic kesejahteraan masyarakat yang cukup rumit dan sering muncul saat ini terutama dalam aspek ekonomi pada masa pandemic, pemerintah perlu memberikan adanya regulasi, perlindungan maupun penyaluran bantuan bagi umkm terutama yang bersifat mikro, pada dasarnya sejak dulu perananan pemerintah bagi para pelaku umkm sudah sangatlah dioptimalkan, hal ini didasarkan pada potensi umkm yang memberikan dampak besar bagi pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi negara dan masyarakat untuk mengetahui peranan pemerintah. Mangkoesobroto, (2016) menyimpulkan jika Keterlibatan pemerintah dalam urusan perekonomian akan selalu ada di seluruh negara manapun itu, dalam

dalam melihat peranan tersebut maka terdapat tiga indikator peranan pemerintah dalam sektor perekonomian, antara lain peranan secara alokasi distribusi, dan stabilisasi. Sehingga dalam peranannya pemerintah kec.Tenggarong seberang menjelaskan peran-peran dan kontribusinya dalam menaikkan nilai-nilai ekonomi masyarakatnya seperti:

- a) Peranan Pemerintah Kec.Tenggarong Seberang secara alokasi dijelaskan bahwa segala bentuk-bentuk anggaran haruslah diarahkan dan diberdayakan untuk meminimalisir angka kemiskinan, pengangguran dan menaikkan kualitas sumber daya, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada perekonomian masyarakat, sehingga intinya peranan pemerintah secara alokasi itu adalah bentuk tindakan dengan menempatkan anggaran yang berguna untuk kepentingan publik atau masyarakat.
- b) Jika peranan pemerintah Kec.Tenggarong seberang dalam hal distribusi bagi Umkm dapat digambarkan dengan bagaimana pemerintah memberikan kemudahan dalam prosedur perizinan pembentukan maupun pendirian Ukm, kemudian pemerintah juga memberikan adanya keringan biaya perizinan ataupun pajak bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) agar dalam masalah pembiayaan mendirikan usaha para wirausaha yang memiliki modal kecil bisa tetap berdiri, tidak hanya itu saja pemerintah juga memberikan bantuan dana sebagai modal Umkm yang berasal dari dana desa, ataupun juga bisa dari alokasi APBN bagi koperasi dan Umkm.
- c) Peranan Pemerintah Kec.Tenggarong Seberang bagi stabilitas dapat digambar dengan adanya program-program yang digagas oleh pemerintah tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Disini pemerintah saling melakukan kerjasama atau bisa disebut dengan collaborative governance untuk membangun kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mencapai kestabilan ekonomi masyarakat. Bpum menjadi salah satu contohnya, yang dimana program ini merupakan program dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat. Program ini dikhususkan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai wirausaha ataupun pemilik umkm, dengan maksud untuk menstabilkan nilai ekonomi masyarakat akibat dampak dari masa pandemi covid 19, maka pemerintah pusat melakukan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten/kecamatan serta pemerintah desa untuk penyaluran pencairan dana bantuan modal bagi umkm yang ada di kecamatan tenggarong seberang, sehingga dengan adanya hal ini pemerintah diharapkan bisa selalu memenuhi peranannya sebagai stabilitas perekonomian.

### **Program BPUM**

Dalam pelaksanaan program bpum ini pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang telah disahkan dalam PERMENKUM No.6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional pada masa pandemi covid-19. Program ini diperuntukkan bagi UMKM terkhusus pada usaha mikro, dan sekaligus sebagai bentuk tanggapan pemerintah atas banyaknya keluhan masyarakat yang terkait dengan penurunan pendapatan yang begitu masif di usaha mikro akibat pandemi covid-19. Bantuan produktif usaha mikro ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi pembangunan ekonomi, terlebih lagi di masa krisis yang sempat terjadi akibat adanya pandemi covid 19, dalam hasil wawancara KASI PMD H.Zukhran.S.Sos menuturkan jika dalam penyaluran bpum ini pemerintah melakukan adanya collaborative government, antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kecamatan hingga desa. Pemerintah ini bekerja sama untuk melakukan pendataan pemohon bantuan secara intensif dari tingkat daerah hingga kedesa. Pihak Pemerintah Kecamatan Tenggarong seberang sendiri diberikan tugas untuk mendata jumlah pemohon bantuan yang tersebar dalam 18 desa di kecamatan tenggarong seberang, selanjutnya pemerintah kecamatan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar pemerintah desa melakukan sosialisasi, dan pemberitahuan terkait dengan diadakannya program Bpum ini bagi pelaku usaha mikro.

Dalam input data pemerintah Kec.Tenggarong seberang sebanyak 1.776 pemohon bantuan usaha mikro telah mendaftar, berikut jumlah data pemohon Bpum berdasarkan bidang usaha:

**Tabel 1** Data Jumlah Pemohon BPUM Berdasarkan pengelompokan bidang usaha

DATA DAN JUMLAH PEMOHON BPUM BERDASARKAN PENGELOMPOKAN BIDANG USAHA			
NO	BIDANG USAHA	JUMLAH USAHA	KATEGORI
1	WARUNG	195	Usaha Mikro
2	TOKO	443	Usaha Mikro
3	WARUNG DAN JASA	18	Usaha Mikro
4	TOKO DAN JASA	9	Usaha Mikro
5	PETERNAK	77	Usaha Mikro
6	PETANI	246	Usaha Mikro
7	PEMBUDIDAYA	55	Usaha Mikro
8	NELAYAN	18	Usaha Mikro
9	JASA	171	Usaha Mikro
10	INDUSTRI	199	Usaha Mikro
11	PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN	345	Usaha Mikro
<b>TOTAL</b>		<b>1776</b>	

**Sumber:** Kasi PMD Kec.Tenggarong Seberang H.Zukran.S.Sos (2021).

Dari data tersebut berbagai macam model bidang usaha mikro telah didirikan oleh masyarakat tenggarong seberang, data ini diambil dan diinput dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang desa ini meliputi: Bangun Rejo, Manunggal Jaya, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Bukit Raya, Embalut, Karang Tunggal, Kerta Buana, Loa Lepu, Loa Pari, Loa Raya, Loa Ulung, Mulawarman, Perjiwa, Separi, Suka Maju, Tanjung Batu, Dan Teluk Dalam. Dalam masa input data ini narasumber memaparkan kendala-kendala yang terjadi didalamnya terkait dengan komunikasi aktif dan partisipasi aktif masyarakat yang masih apatis dan kurang untuk memahami dan menerima informasi dengan baik menjadikan penargetan pencairan dana untuk seluruh pelaku mikro belum tercapai secara keseluruhan.

Selain itu juga proses pendaftaran yang bersifat online serta pencairan dana yang melalui Bank BRI mengharuskan penerima bantuan untuk memiliki rekening tersebut, dan untuk penerima yang belum memiliki rekening tersebut maka diharapkan untuk segera membuka rekening agar proses pencairan bisa segera dilakukan. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam penargetan penyaluran dana bantuan produktif usaha mikro terlebih lagi jika yang memiliki usaha mikro merupakan kategori lanjut usia dan kurang memahami teknologi maka dalam proses pencairan dana akan sedikit sulit.

Untuk jumlah pencairan dana ini pihak Pemerintah Kecamatan maupun Desa belum mengetahui berapa jumlah pasti yang didapatkan oleh penerima, sebab pihak pemerintah kecamatan dan desa hanya ditugaskan untuk melakukan pemberitahuan, sosialisasi sekaligus input data terhadap pemohon bantuan BPUM. Namun telah tercantum dalam PERMEN KUKM No.6 Tahun 2020 dalam pasal 3 jika BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah RP 2.400.000,00 ( Dua Juta Empat Ribu Rupiah).

Setelah dilaksanakannya pencairan Dana Bpum tahap satu pemerintah melakukan adanya evaluasi, dan hasil yang didapatkan ternyata masih banyak pelaku ukm yang belum mendapatkan bantuan produktif usaha mikro ini sehingga pemerintah membuka kembali pendaftaran pemohon bantuan produktif usaha mikro. Untuk tahap dua ini sendiri hanya dikhususkan bagi pelaku usaha mikro yang belum pernah mendaftar didalam program Bpum dan juga persyaratan yang sama pada tahap pertama yaitu tidak sedang terikat oleh pinjaman bank atau dimanapun.

#### 4. Kesimpulan

Dalam pengembangan Sektor Umkm melalui program BPUM di Kecamatan Tenggarong seberang pemerintah hanya berfokus pada penambahan modal usaha berupa uang untuk para pelaku usaha mikro. Program BPUM di kecamatan Tenggarong seberang berhasil membangkitkan usaha mikro dengan perlahan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mengalokasikan segala bentuk tindakan dengan menempatkan anggaran yang berguna untuk kepentingan publik atau masyarakat. pemerintah Kec. Tenggarong seberang berperan dalam distribusi seperti mempermudah prosedur perizinan, pembentukan, maupun pendirian Umkm serta meringankan biaya perizinan ataupun pajak bagi Umkm. Pemerintah Kec. Tenggarong Seberang berperan sebagai stabilitas dengan melakukan collaborative governance untuk membangun kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mencapai kestabilan ekonomi masyarakat

Di kecamatan tenggarong seberang terdapat 1776 pemohon dari 18 desa dengan 11 bidang usaha. kendala yang sering terjadi adalah komunikasi aktif serta partisipasi aktif masyarakat cenderung apatis dan kurang dapat memahami dan menerima informasi dengan baik. Pencairan dana program Bpum ditransfer langsung ke rekening pemohon yang belum pernah terdaftar dalam program Bpum sebelumnya. Pengimplementasian program pengembangan umkm ini sudah memberikan dampak baik bagi perkembangan perekonomian masyarakat terbukti dari banyaknya antusias pelaku umk yang mendaftar sebagai pemohon program bantuan, meskipun banyak kendala yang terjadi dalam implementasinya namun pemerintah telah melakukan evaluasi secara aktif untuk memperbaiki kendala serta hambatan yang terjadi sebelumnya. Pada dasarnya pengembangan umkm tidak hanya difokuskan pada masalah permodalan, bantuan yang diberikan pemerintah pada dasarnya menyesuaikan pada kondisi dan situasi di sekitar lingkungan, pandemi cukup membuat masyarakat cemas terutama dalam masalah ekonomi, maka dari itu pemerintah mencoba untuk melakukan pengembangan umkm dengan berfokus pada bantuan modal bukan pada pengembangan inovasi kreatifitas umkm sebab hal ini menyangkut pada pokok permasalahan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dimasa covid-19.

#### Acknowledgment

Terimakasih Kepada kehadiran Tuhan yang maha Esa yang mana telah memberikan kami kesempatan serta izin untuk menyelesaikan kajian ini. Terimakasih kepada Bapak Sugiarto.SH.MS.i selaku Camat beserta Bapak H.Zukran.S.Sos sebagai Kasi PMD di Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang. Dan Terimakasih kepada Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

#### References

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia\* Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2). Retrieved from <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Dewantara, Ki Hadjar, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>

- Hamidah, Q. R., Sejati, A. T. P., & Mujahidah, A. Z. (2019). The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0. *Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series*, 53(9), 1689–1699.
- Leiwakabessy, P., & Lahallo, F. F. (2018). Pada Umkm Kabupaten Sorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Victory Sorong Usaha Mikro , kecil dan menengah ( UMKM ) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan. [Http://jurnal.lpmiunvic.Ac.Id/Index.Php/Jpkem/Article/View/2/4](http://jurnal.lpmiunvic.ac.id/index.php/jpkem/article/view/2/4), 1(1), 11–21.
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93–103.
- Permen Kukm No 6 Tahun. (2020). *tentang BPUM*.
- Purnama Yahya, M., Santoso, B., & Hariswanto, A. (2018). Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah). *Profit*, 12(02), 31–37. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2018.012.02.4>
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>
- Sanggrama, E. B. (2020). Sebuah Solusi untuk Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 146–158. Retrieved from <http://journal.maranatha.edu>
- Suci, Y. R. (2016). Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Development*, 4(2), 70–88.
- Suparwo, A., Suhendi, H., Roisah, R., Arifin, T., & Shobary, M. N. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. *Jurnal Abdimas BSI, Vol.1 No.2*(E-ISSN: 2614-6711), 208–214.